Sejarah Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan

Latar belakang

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan di Indonesia dimulai pada tahun 2018 dengan nama Inisiatif Terpercaya, sebuah inisiatif yang didanai Uni Eropa untuk melacak minyak sawit berkelanjutan dan mendefinisikan keberlanjutan yurisdiksi dalam skala besar. "Terpercaya" berarti dapat dipercaya dalam bahasa Indonesia dan nama tersebut mencerminkan tujuan inisiatif untuk menghasilkan informasi dan analisis yang kredibel untuk meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan terhadap keberlanjutan minyak sawit Indonesia. Inisiatif Terpercaya dipandu oleh Komite Penasihat Terpercaya, yang diketuai bersama oleh Bappenas dan Uni Eropa (UE), yang selanjutnya berubah menjadi Komite Penasihat Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB). Terpercaya diadopsi oleh Pemerintah Indonesia sebagai Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan pada November 2022.

Tujuan dan ruang lingkup

Tujuan Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan adalah untuk mempromosikan transisi ke produksi komoditas berkelanjutan dengan menunjukkan kemajuan kabupaten di Indonesia menuju keberlanjutan, dan memberi insentif guna mendorong kemajuan lebih lanjut dengan memperkuat perdagangan minyak sawit berkelanjutan.

Dengan mengukur kinerja kabupaten dan berkomunikasi dengan pembuat kebijakan dan pelaku pasar, inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat upaya mengatasi tantangan-tantangan tata kelola, peraturan, dan teknis untuk mencapai keberlanjutan.

Dengan menyelaraskan aktor rantai pasok nasional dan internasional dalam upaya mereka, inisiatif ini berusaha untuk melindungi hutan dan memberikan manfaat inklusif - kepada petani kecil, perusahaan, dan konsumen.

Memilih dan menyempurnakan indikator berkelanjutan

Melalui dialog multi-pemangku kepentingan, 23 Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan (IYB) telah dipilih dan diujicobakan untuk mengukur produksi komoditas yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kabupaten. Indikator – indikator dikelompokkan di bawah pilar lingkungan, sosial, ekonomi, dan tata kelola, serta didasarkan pada hukum dan peraturan Indonesia. Mereka melengkapi sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dan Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan selaras dengan komitmen internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB (SDGs) dan Nationally Determined Contribution (NDC) di bawah Perjanjian Paris.

Pengumpulan dan validasi data

Indikator dirancang dengan mempertimbangkan ketersediaan data di Indonesia. Apabila dimungkinkan, set data tingkat nasional digunakan untuk menyediakan sarana verifikasi. Untuk memvalidasi data, diskusi kelompok fokus telah diadakan di tingkat nasional dan lokal.

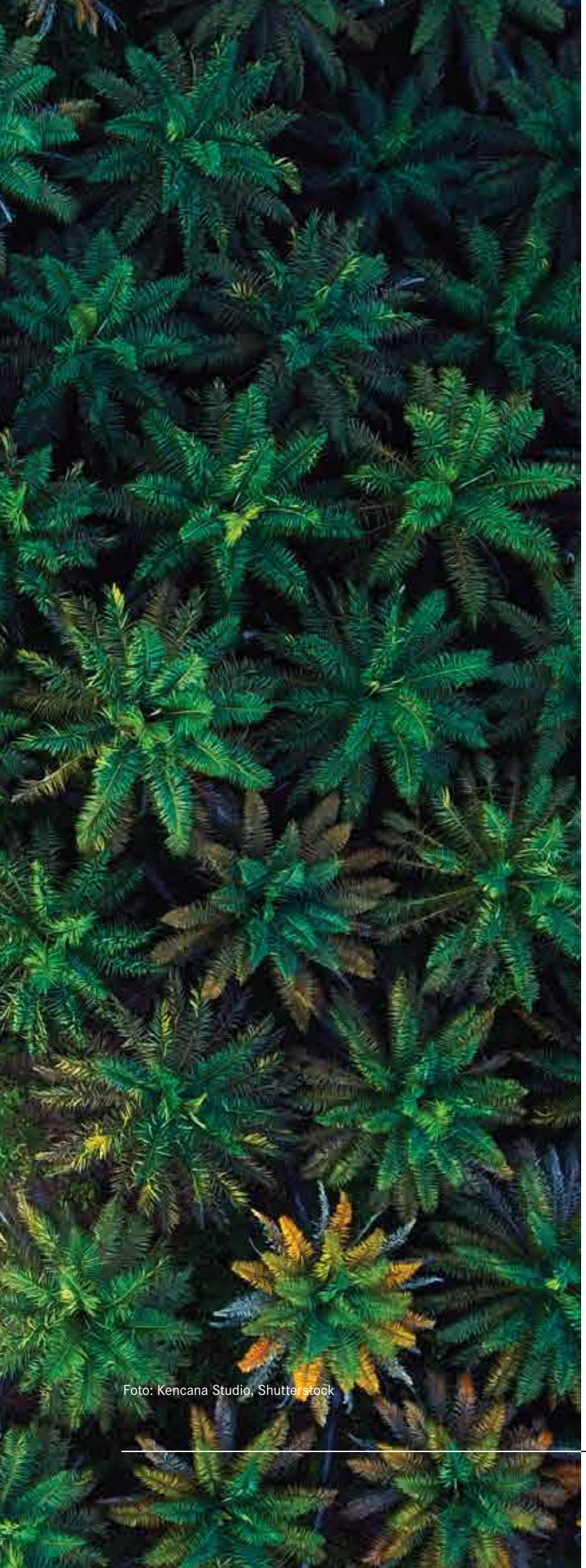

Foto: Kencana Studio, Shutterstock

Dialog multi-pemangku kepentingan

Keterlibatan pemangku telah menjadi elemen kunci dalam semua kegiatan. Melalui keterlibatan aktif pemangku kepentingan, kepemilikan inisiatif dan keluarannya telah menjangkau banyak individu dan institusi sepanjang rantai pasok kelapa sawit. Keterlibatan para pihak tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan dan mempertahankan dukungan untuk keberlanjutan kelapa sawit.

Aspek kunci dari dialog yang dibangun melalui adalah Komite Penasihat Indikator Yurisdiksi Berkelanjutan atau Advisory Committee (AC) yang bersifat multipihak. Diketuai bersama oleh Bappenas dan UE, AC terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan kabupaten, masyarakat sipil, dan industri untuk memastikan bahwa dialog yang berlangsung mencakup tema sosial, ekonomi, tatakelola dan lingkungan, selain juga memastikan penerimaan pasar.

AC melanjutkan tugas-tugas sebelumnya dari pendahulunya, AC Terpercaya, memberi nasihat tentang implementasi inisiatif dan telah memiliki peran kunci dalam desain indikator, pengumpulan data, dan penyebaran data sambil juga memberikan informasi tentang kebijakan yang relevan.

Platform data untuk pasar dan perencanaan pemerintah

Platform data IYB dikembangkan dengan pendanaan Uni Eropa dan diserahkan kepada Bappenas pada November 2021. Platform data IYB dapat menguntungkan pelaku pasar Indonesia dan global tanpa biaya yang signifikan atau beban administrasi yang berlebihan.

Sistem ini memberikan potensi dalam kaitannya dengan proses pemerintah, termasuk perencanaan pembangunan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi untuk mempromosikan transisi menuju keberlanjutan baik di yurisdiksi terdepan maupun yang kurang maju. Pemerintah kabupaten juga dapat menilai kemajuan mereka sebagai dasar perencanaan pembangunan dan alokasi anggaran.

Platform ini selanjutnya bertujuan untuk mendukung pelaku pasar dalam uji tuntas dan membuat keputusan sumber dan investasi berdasarkan kinerja keberlanjutan kabupaten.

Bappenas selanjutnya mengembangkan platform ini untuk menginformasikan proses perencanaan pembangunan, memandu alokasi dana untuk mendukung kabupaten dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan mereka, dan untuk menarik investasi hijau.

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri sedang mempersiapkan untuk mengintegrasikan IYB ke dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) untuk memantau pelaksanaan rencana aksi kelapa sawit berkelanjutan daerah (RAD-KSB).

Foto: Yogie Hizkia, Shutterstock

Foto: Dede Sudiana, Shutterstock

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dan KAMI

Proyek KAMI (Keberlanjutan minyak sawit Malaysia dan Indonesia) bertujuan untuk memperkuat kemitraan UE-Indonesia dan UE-Malaysia dengan mendukung proses nasional dan dialog internasional tentang minyak sawit berkelanjutan. Ini dibangun di atas inisiatif Terpercaya, dan bekerja dengan para pemangku kepentingan untuk mengembangkan informasi tentang produksi minyak sawit dan keterlacakan untuk memperkuat rantai pasokan untuk minyak sawit legal, bebas deforestasi dan berkelanjutan.

Di Indonesia, KAMI mendukung platform data IYB untuk memperluas fungsinya dalam memenuhi kebutuhan domestik dan kebutuhan pasar internasional. Dalam konteks ini, KAMI mendukung Komite Penasihat IYB untuk membangun pemahaman bersama tentang keberlanjutan kabupaten dan keterlacakan rantai pasokan di Indonesia, dan untuk memberi nasihat tentang pelaksanaan kegiatan yang disetujui oleh Dewan Nasional Strategis KAMI.

KAMI juga bertujuan untuk mendukung prioritas yang diidentifikasi oleh anggota Komite Penasihat dan aktor rantai pasok minyak sawit lainnya untuk memperkuat kredibilitas platform data. Sebagai contoh, KAMI mendukung pembangunan:

- Modul ketertelusuran rantai pasokan yang memberikan informasi yang jelas tentang asal usul minyak sawit dan produksinya yang legal dan bebas deforestasi;
- Mekanisme pemantauan dan verifikasi data indikator untuk memperkuat kredibilitas di antara pelaku pasar dan pengguna informasi lainnya.

Laman web KAMI dan Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan juga memberikan beberapa informasi tambahan: https://efi.int/partnerships/KAMI.

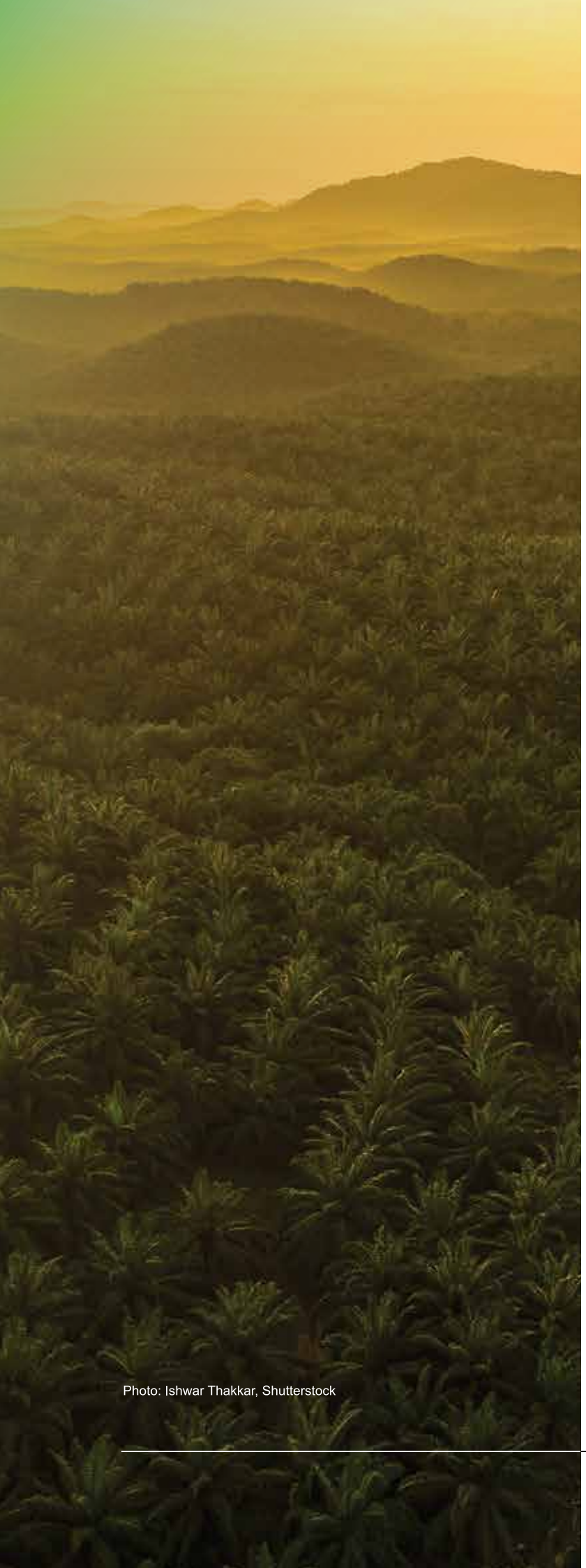

Photo: Ishwar Thakkar, Shutterstock

Nilai tamba

Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan menawarkan manfaat bagi banyak kelompok pemangku kepentingan, mulai dari petani kecil hingga konsumen, pemerintah daerah hingga nasional, serta negara-negara produsen dan konsumen. Itu berbeda dari upaya keberlanjutan lainnya karena cakupan nasionalnya dan fokusnya pada kabupaten, selain menekankan pada penambahan nilai dengan melengkapi, bukan bersaing dengan skema dan komitmen yang ada. Beberapa hal dimana pendekatan yuridiksi berkelanjutan dapat memberikan nilai tambah diantaranya:

- **Menyebarluaskan informasi yang kredibel** tentang keberlanjutan kabupaten ke pasar internasional dan untuk pelaku rantai pasok, termasuk pemangku kepentingan pemerintah dan masyarakat sipil;
- **Memperkuat keterlibatan multipemangku kepentingan,** melalui dan kolaborasi;
- **Melengkapi skema sertifikasi produk berkelanjutan** dengan memberikan informasi yang mencakup semua hutan dan semua produsen di kabupaten, sehingga memperkuat rantai pasok untuk minyak sawit berkelanjutan;
- **Mendukung pendaftaran petani, resolusi isu kepemilikan lahan** dan rekonsiliasi peta spasial perencanaan yang sesuai dengan situasi di lapangan;
- **Mengidentifikasi dan mengisi kesenjangan informasi** pada data resmi terkait keberlanjutan dan ketertelusuran;
- **Mengidentifikasi kabupaten yang membutuhkan dukungan** dalam meningkatkan keberlanjutannya, termasuk yang terkait petani kecil swadaya.

Potensial nilai tambah untuk pemangku kepentingan utama

Petani kecil	Dengan memasukkan semua aktor di suatu kabupaten dan menciptakan ruang berusaha yang setara, petani kecil dapat memperoleh manfaat tidak hanya akses ke rantai pasok untuk minyak sawit berkelanjutan, tetapi juga dukungan yang harapannya akan diberikan oleh sektor swasta dan pemerintah pusat dan juga daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan profil keberlanjutan kabupaten.
Pemerintah daerah / yurisdiksi	Kabupaten yang membuat kemajuan menuju keberlanjutan dapat menunjukkan pencapaian mereka dan mendapatkan pengakuan atas upaya mereka, sehingga memperkuat permintaan akan minyak sawit berkelanjutan. Kabupaten yang kondisinya masih juga dapat didukung dalam upaya mereka untuk meningkatkan keberlanjutan.
Pemerintah nasional	Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan mendukung upaya Indonesia dalam mewujudkan komitmennya terhadap produksi dan transparansi komoditas secara berkelanjutan dan terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Organisasi masyarakat sipil	Organisasi nonpemerintah dapat memperoleh manfaat dengan berkontribusi bagi dan mengakses informasi obyektif tentang berbagai elemen keberlanjutan produksi minyak sawit di Indonesia, untuk membantu mendorong kemajuan dalam meningkatkan standar sosial dan lingkungan.
Pelaku industri / produsen besar	Karena kinerja petani kecil adalah elemen kunci dalam keberlanjutan kabupaten, pelaku industri besar dapat memperoleh manfaat melalui pendekatan inklusif dan dukungan yang dapat diberikan Pendekatan Yurisdiksi Berkelanjutan dalam membantu perusahaan untuk memenuhi komitmen keberlanjutan mereka dan memeratakan ruang berusaha untuk semua.
Pembeli / pedagang	Menyuplai informasi kepada pembeli dan pedagang tentang kinerja keberlanjutan dan memberi mereka kemampuan untuk membeli produk dari kabupaten yang bekerja menuju target dan tujuan keberlanjutan yang disepakati secara luas, yang juga diminta oleh konsumen.

Halaman sampul: Wanita sedang duduk dan beristirahat di bawah pohon kelapa sawit

---

Penyangkalan. Publikasi ini diproduksi dengan dukungan finansial dari Uni Eropa. Pandangan yang diungkapkan dalam dokumen ini sama sekali tidak dapat dianggap mencerminkan pendapat resmi Uni Eropa.

© European Forest Institute, 2023

KAMI EFI BAPPENAS Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Funded by the European Union